KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Komisi III: Keberatan Pencekalan Setnov Bukan Urusan Pimpinan
Tanggal : Selasa, 18 April 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

Komisi III: Keberatan Pencekalan Setnov Bukan Urusan Pimpinan

JAKARTA-Internal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai kisruh soal surat protes pencekalan Ketua DPR RI, Setya Novanto keluar negeri selama enam bulan kepada Presiden Joko Widodo. Terlebih, surat yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI itu hingga saat ini masih misteri. Alasannya, lembaga wakil rakyat itu masih menundanya.

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo berpendapat, keberatan terhadap pencekalan Setya Novanto ke luar negeri seharusnya bukan urusan pimpinan DPR. Menurutnya, hal itu seharusnya diserahkan ke Komisi III DPR yang bermitra dengan KPK. "Keinginan kita adalah persoalan mitra komisi diselesaikan di komisi lah. Supaya kita berharap domain yang menjadi urusan mitra komisi-komisi yang di DPR diselesaikan di komisi agar tidak ada kegaduhan yang tidak perlu," ungkapnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (17/4).

Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo menegaskan, pimpinan DPR seharusnya tidak mengurus perihal surat keberatan tersebut. Komisi III dapat menggelar rapat untuk menanyakan alasan pencekalan Novanto. "Justru kami menyarankan persoalan mengirim nota itu jangan jadi domain pimpinan. Domain komisi III saja, kan kita bisa tanya ke pimpinan KPK landasan hukumnya apa, walaupun kita tahu jawabannya subjektivitas penyidik," sebutnya.

Bamsoet juga mendapat kabar surat keberatan tersebut ditunda untuk dikirim ke presiden. Surat disebutnya masih berada di tangan pimpinan DPR. "Saya dengar informasi DPR tidak jadi mengirim surat ke presiden. Saya dengar informasinya pimpinan mengurungkan mengirimkan ke presiden, ditunda. (Surat keberatan, Red) di pimpinan DPR. Mungkin ke Sekjen," imbuhnya.

Dikonfirmasikan, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengaku tidak tahu nota protes pencekalan Novanto oleh KPK untuk Presiden Joko Widodo ditunda seperti yang disampaikan Bamsoet. "Saya tidak tahu, kan harusnya di Sekretariat Jenderal DPR," imbuhnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, waktu itu sudah ada rapat Bamus, namun untuk teknisnya tentu harus ditanyakan kepada kesekretariatan DPR. Ia meminta agar ditanyakan kepada Kesekjenan DPR dan Bamus karena diputuskan dalam rapat Bamus beberapa waktu lalu. "Pokoknya waktu itu ada bamus teknisnya seperti apa, itu di Sekjen DPR," kilahnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI lainnya, Fahri Hamzah. Dia menjelaskan, saat ini seharusnya surat ada di Sekjen DPR. "Itu di Sekjen, kan berhubungan Sekjen," singkatnya.

Anehnya, Sekretaris Jenderal DPR RI, Achmad Djuned mengaku pimpinan DPR belum menyerahkan surat itu. Usai rapat Bamus yang dihadiri semua fraksi di DPR kecuali Partai Demokrat dan Hanura, belum ada surat turunan ke Sekjen. "Kemarin kita ada rapat (rapat Bamus, Red), belum sampai (surat belum sampai ke Sekjen, Red)," jelasnya saat dihubungi, kemarin.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto mengaku, pihaknya menunda pengiriman surat keberatan pencekalan Novanto ke Presiden Joko Widodo. "Kayaknya (pengiriman surat keberatan pencekalan Novanto, Red) ditunda," kata Agus.

Kendati demikian, Agus tak bisa memastikan secara pasti mengapa surat itu ditunda. Dia menyarankan, bertanya kepada pimpinan yang saat itu ikut rapat Bamus membahas surat keberatan itu, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah atau Taufik Kurniawan. (aen)